

# ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023  
VOLUME 1, 2024



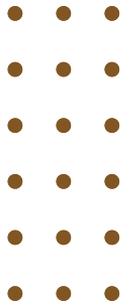
<https://suls.bps.go.id>



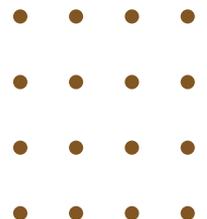


# **ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023  
VOLUME 1, 2024**



<https://sulsel.bps.go.id>



# **ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

Volume 1, 2024

Nomor Publikasi : 73000.24022  
Katalog : 4101041.73  
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : xvi+35 halaman

Penyusun Naskah:  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

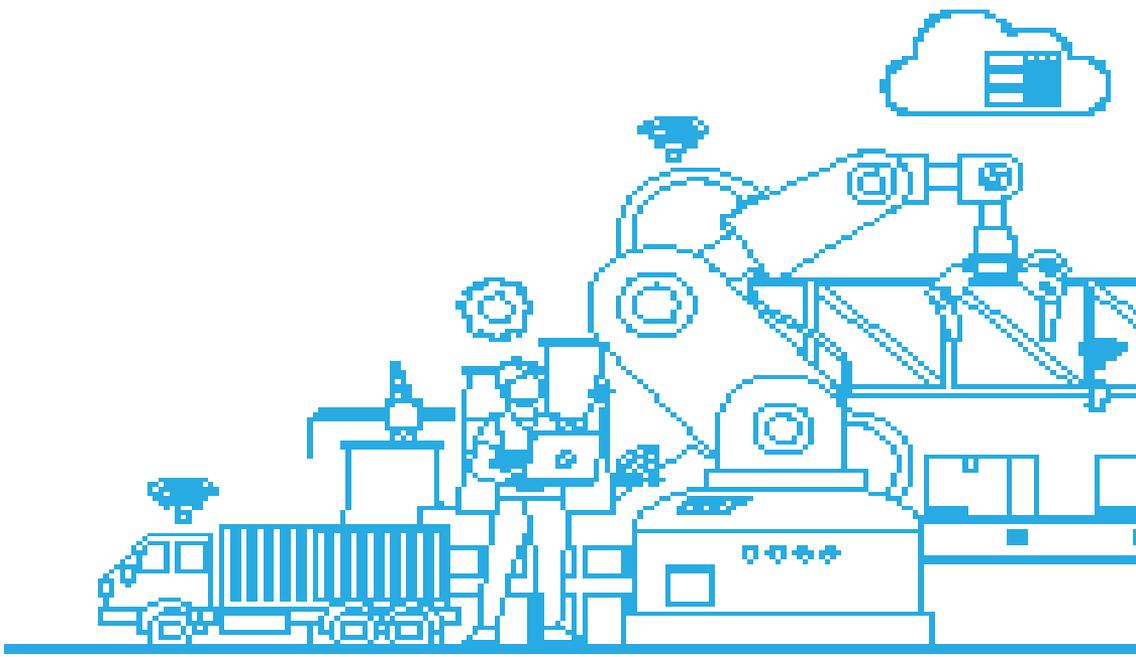
Penyunting:  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pembuat Kover :  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penerbit :  
© BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dicetak oleh :  
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dilarang mereproduksi dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari **Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan**



**TIM PENYUSUN**  
**ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**  
Volume 1, 2024

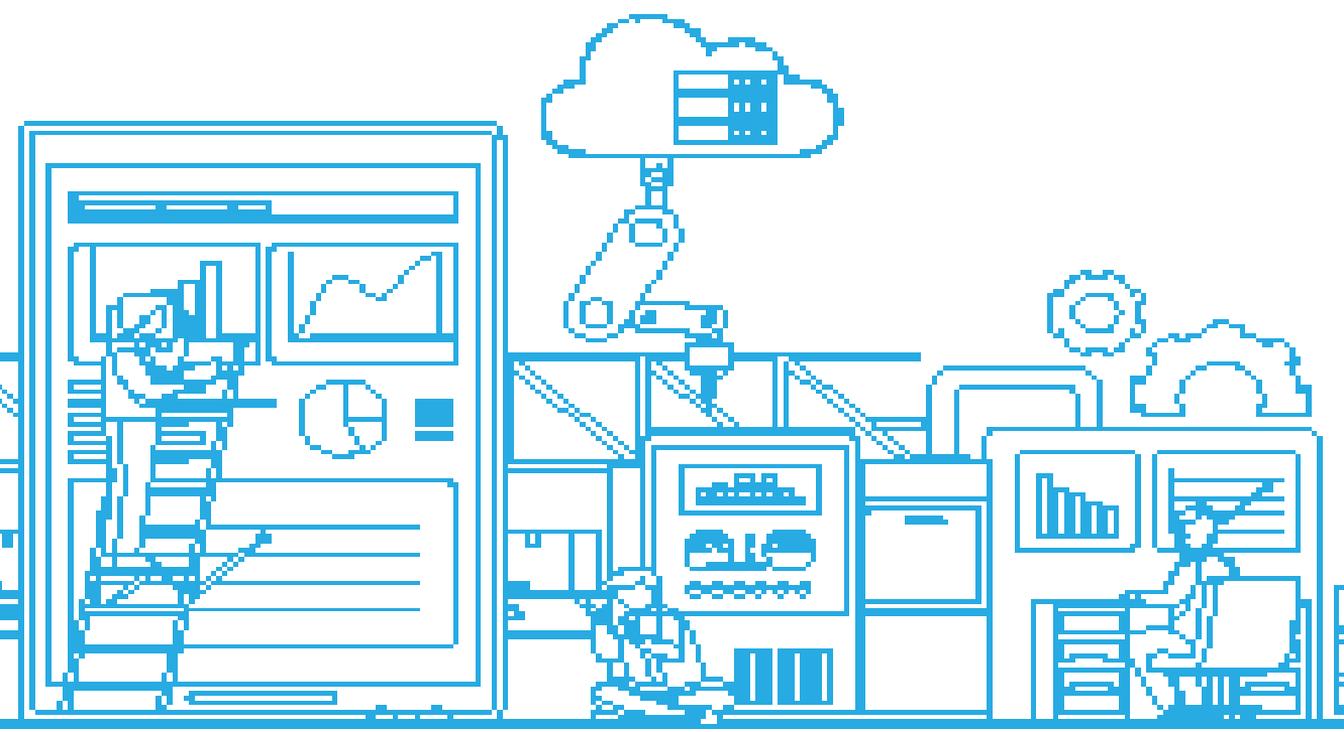
**Pengarah**  
Aryanto

**Penanggungjawab**  
Suri Handayani

**Penyunting**  
Thini Isywari Hadi

**Penulis**  
Daswita Tri Ariani  
Rosyita Darojati A'laa

**Penata Letak**  
Rosyita Darojati A'laa





# Kata Pengantar

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan merupakan publikasi yang dibuat oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan secara rutin akan terbit setiap tahun. Publikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang ingin melihat perkembangan data sosial di Sulawesi Selatan secara berkala setiap tahunnya. Diharapkan publikasi ini semakin memudahkan konsumen data dalam memahami data-data indikator makro sosial yang secara rutin dirilis oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi Analisis Indikator Makro Sosial Sulawesi Selatan Tahun 2023 berisi ulasan/analisis singkat tentang data-data indikator sosial Sulawesi Selatan antara lain perkembangan kependudukan, tenaga kerja, kemiskinan serta pembangunan manusia. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, dalam publikasi ini juga disertakan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang ditampilkan.

Semoga publikasi ini bias memberikan informasi barhagra bagi pengguna data BPS, baik aparat pemerintah maupun publik, dan diharapkan publikasi ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga publikasi ini bisa disajikan. Kritik dan saran akan sangat berharga untu penyempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Makassar, April 2024

**Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Selatan**



**Aryanto**



# PENJELASAN TEKNIS

## Penduduk

- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Sumber data penduduk yang tersedia secara periodik hanyalah Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk digunakan dalam proyeksi penduduk.
- Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi).

## Kemiskinan

- Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM)

$$GK=GKM+GKNM$$

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.
- Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
- Ukuran Kemiskinan
  1. *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
  2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
  3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

- Koefisien gini (Gini Rasio) didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

$$GR = 1 - \sum_{i=0}^n f_{pi} X (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

GR = Koefisien gini

$F_{pi}$  = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F_{ci}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

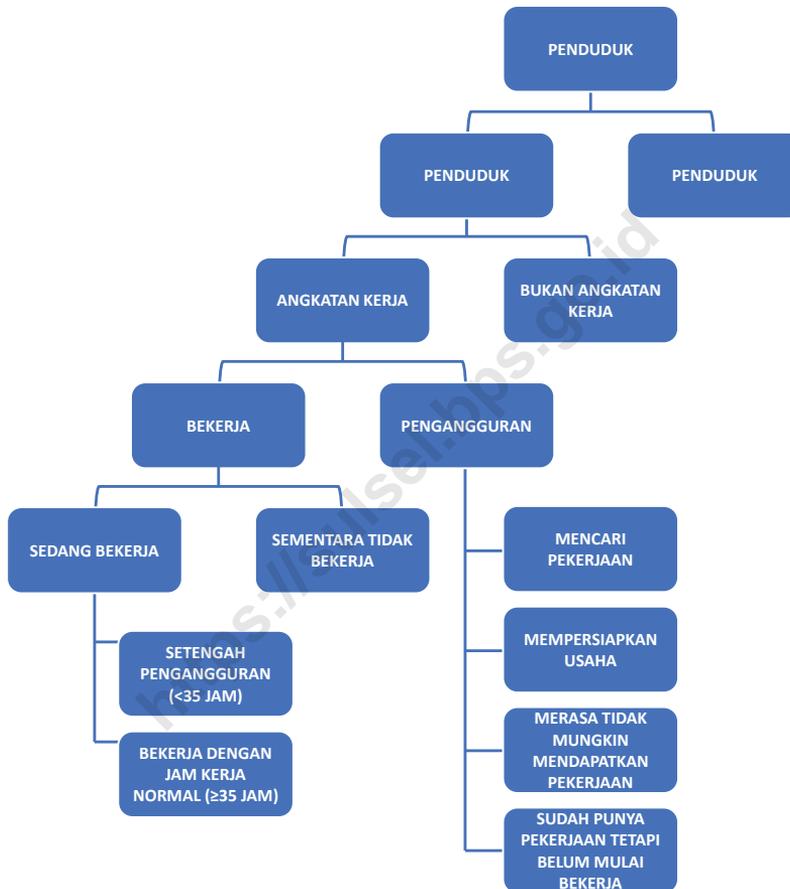
$F_{ci-1}$  = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

- Gini Rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Gini Rasio berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

### Ketenagakerjaan

- Konsep yang digunakan dalam data ketenagakerjaan adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- Definisi baku dari penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai dengan 2000, sedangkan sejak tahun 2001 definisi pengangguran mengalami penyesuaian/perluasan menjadi sebagai berikut:
- Penganggur adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (*open unemployment*).

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
- Diagram Ketenagakerjaan



### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan rata-rata dari indeks *longevity*, indeks pendidikan dan indeks tingkat hidup layak. Terdapat 4 indikator (dari 3 dimensi) pembentuk angka IPM:
  1. Dimensi Kesehatan diukur dengan indikator: Umur Harapan Hidup,
  2. Dimensi Pendidikan diukur dengan indikator: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah,
  3. Dimensi Hidup Layak diukur dengan indikator: Pengeluaran Perkapita Disesuaikan.

- Status pembangunan manusia
  - Rendah :  $< 60$
  - Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
  - Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
  - Sangat tinggi :  $\geq 80$
- Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

<https://sulsel.bps.go.id>

# Daftar Isi

**ANALISIS INDIKATOR MAKRO SOSIAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023  
Volume 1, 2024**

v	·	<b>KATA PENGANTAR</b>
vii	·	<b>PENJELASAN TEKNIS</b>
xi	·	<b>DAFTAR ISI</b>
xiii	·	<b>DAFTAR GAMBAR</b>
xv	·	<b>DAFTAR TABEL</b>
·		
1	·	<b>BAB I</b>
	·	PENDUDUK
·		
7	·	<b>BAB II</b>
	·	KEMISKINAN
·		
15	·	<b>BAB III</b>
	·	KETENAGAKERJAAN
·		
27	·	<b>BAB IV</b>
	·	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
·		
33	·	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>



# Daftar Gambar

- 4 : Gambar 1.1 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan 2023
- 5 : Gambar 1.2 Proporsi penduduk menurut usia produktif dan nonproduktif, 2023
- 10 : Gambar 2.1 Kondisi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023
- 10 : Gambar 2.2 Pertumbuhan Garis Kemiskinan Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2023 (Persen)
- 11 : Gambar 2.3 Garis Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2023 (Rupiah, Persen)
- 12 : Gambar 2.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2023
- 18 : Gambar 3.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2021–Agustus 2023
- 19 : Gambar 3.2 Persentase Penduduk bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2023
- 20 : Gambar 3.3 Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Kegiatan Utama, Agustus 2023
- 27 : Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan (SP2020-LF), 2020–2023
- 28 : Gambar 4.2 Sebaran Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023
- 30 : Gambar 4.3 Sebaran Kabupaten/Kota menurut Indikator pada Indeks Pendidikan (HLS dan RLS), 2023
- 31 : Gambar 4.4 Sebaran Kabupaten/Kota menurut Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan dan Pertumbuhannya, 2023



# Daftar Tabel

3	•	Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023
17	•	Tabel 3.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan, 2021-2023 (Orang)
20	•	Tabel 3.2	Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Kegiatan Utama, Agustus 2021–Agustus 2023 (Orang)
21	•	Tabel 3.3	Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2021-Agustus 2023 (orang)
22	•	Tabel 3.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2021–Agustus 2023
23	•	Tabel 3.5	Karakteristik Pengangguran (persen), Agustus 2021–Agustus 2023



# BAB I

# PENDUDUK



<https://sulsel.bps.go.id>



## BAB 1 PENDUDUK

Jumlah penduduk provinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan mencapai 9,36 juta orang pada tahun 2023, dengan tren yang menunjukkan pertumbuhan yang bertahap hingga mencapai 10,44 juta pada tahun 2035. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 4,65 juta Jiwa, sedangkan penduduk perempuan yaitu sebanyak 4.71 juta jiwa. Distribusi umur menunjukkan bahwa populasi muda (0-34 tahun) didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan lebih mendominasi pada kelompok umur 35 tahun ke atas. Hal ini bisa menggambarkan perbedaan dalam tingkat kelangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan, yang mungkin dipengaruhi oleh akses ke layanan kesehatan, perilaku berisiko, dan kondisi kerja. Jumlah perempuan di kelompok umur yang lebih tua yang lebih banyak juga menggambarkan tren umum peningkatan harapan hidup perempuan dibandingkan laki-laki, yang terlihat secara global.

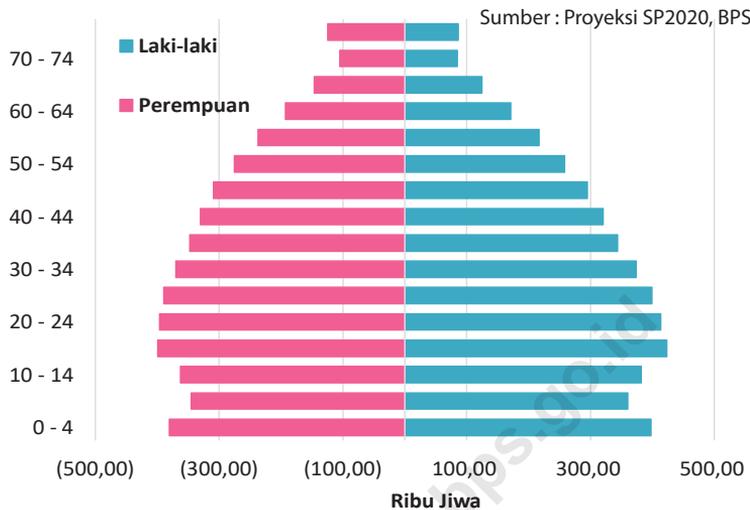
**Tabel 1.1** Proyeksi Penduduk Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 4	398,03	380,68	778,71
5 - 9	360,49	345,30	705,79
10 - 14	381,93	362,84	744,77
15 - 19	423,36	399,17	822,53
20 - 24	413,58	396,35	809,92
25 - 29	398,91	389,32	788,23
30 - 34	373,72	370,29	744,01
35 - 39	343,96	347,35	691,31
40 - 44	320,76	330,03	650,79
45 - 49	295,15	309,11	604,26
50 - 54	257,80	275,34	533,14
55 - 59	216,92	237,42	454,35
60 - 64	170,88	192,62	363,50
65 - 69	124,88	146,18	271,06
70 - 74	84,70	104,71	189,41
75+	86,12	124,41	210,53
<b>Jumlah</b>	<b>4.651,18</b>	<b>4.711,11</b>	<b>9.362,29</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020–2035

Rasio jenis kelamin, yang mengukur perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 98,73. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat sekitar 99 laki-laki. Rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Tana Toraja dengan 106,89, diikuti oleh Kabupaten Luwu Timur dengan 105,28, dan Kabupaten Toraja Utara dengan 104,14. Hanya terdapat delapan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100, yang menandakan dominasi jumlah laki-laki. Sementara itu, kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin terendah adalah Kabupaten Soppeng dengan 93,60, Kabupaten Wajo dengan 94,70,

dan Kabupaten Bulukumba dengan 95,45, menunjukkan dominasi perempuan. Rasio yang lebih rendah dari 100 ini tidak hanya mencerminkan jumlah penduduk perempuan yang lebih besar, tetapi juga dapat memberikan wawasan penting tentang kebutuhan demografis dan sosial yang spesifik, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi danendorongan kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesempatan kerja.



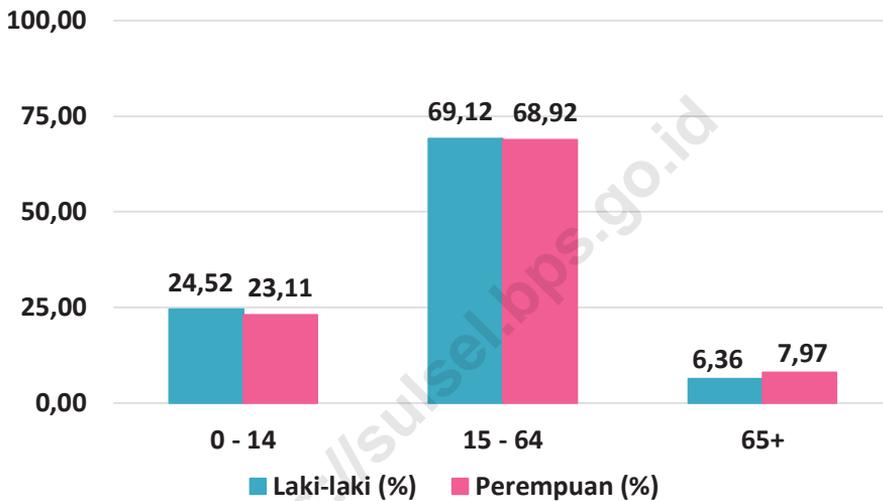
**Gambar 1.1** Piramida Penduduk Sulawesi Selatan 2023

Piramida penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menampilkan struktur yang expansive, yang ditandai dengan persentase penduduk muda yang besar. Bentuk piramida yang lebar di bagian bawah, yang direpresentasikan oleh kelompok umur 0-14 tahun, menunjukkan tingkat kelahiran relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan populasi muda yang besar ini menunjukkan potensi demografis yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, namun juga mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk investasi dalam pendidikan dasar, kesehatan anak, dan infrastruktur yang mendukung pengembangan anak.

Cembungan pada bagian tengah piramida, yang mencakup kelompok umur produktif, menunjukkan bahwa ada basis penduduk yang cukup besar yang sedang berada di puncak potensi ekonominya. Hal ini membawa peluang sekaligus tantangan, berupa peluang dalam hal kontribusi ekonomi dan pembangunan, serta tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup dan memenuhi ekspektasi pendidikan dan kesehatan yang berkembang. Dalam konteks ini, eksplorasi pengembangan industri dan sektor jasa misalnya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem lokal.

Sementara itu, keruncingan piramida pada kelompok umur 65 tahun ke atas menandakan proporsi penduduk lansia yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Hal ini merupakan karakteristik dari populasi yang masih berada dalam fase transisi demografi, dimana tingkat kelahiran dan kematian yang berkurang belum sepenuhnya tercermin dalam proporsi penduduk lansia yang lebih besar. Keruncingan pada

bagian atas piramida ini dapat mengindikasikan bahwa saat ini, beban sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan penduduk lansia masih dalam kapasitas yang lebih terkelola oleh sistem kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Namun, kecenderungan ini juga memberikan indikasi penting untuk perencanaan jangka panjang. Diperlukan perencanaan proaktif untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung populasi yang menua, termasuk penyediaan layanan kesehatan yang spesifik, pengembangan program pensiun yang berkelanjutan, dan memperkuat jaringan pengaman sosial. Seiring berjalannya waktu dan dengan peningkatan harapan hidup, akan terjadi pertumbuhan jumlah lansia yang akan membutuhkan perhatian khusus dalam hal layanan kesehatan, dukungan sosial, dan infrastruktur yang ramah lansia.



**Gambar 1.2** Proporsi Penduduk Menurut Usia Produktif dan Nonproduktif, 2023

Sumber : Proyeksi SP2020, BPS

Gambar 1.2 menggambarkan proporsi penduduk Sulawesi Selatan menurut kelompok usia produktif dan nonproduktif untuk tahun 2023. Dengan mayoritas penduduk berusia 15 hingga 64 tahun, yaitu 69,12 persen dari populasi laki-laki dan 68,92 persen dari populasi perempuan, struktur umur ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia kerja. Di sisi lain, penduduk usia nonproduktif, yang terdiri dari penduduk muda (0-14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas), memiliki proporsi yang lebih kecil, dengan 24,52 persen untuk laki-laki dan 23,11 persen untuk perempuan penduduk muda nonproduktif, serta 6,36 persen untuk laki-laki dan 7,97 persen untuk perempuan pada lansia.

Rasio ketergantungan, yang mengukur jumlah individu usia nonproduktif dibandingkan dengan jumlah individu usia produktif dalam suatu populasi, tercatat di Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah 44,88. Angka ini menandakan bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 45 orang usia nonproduktif. Proporsi ini mencerminkan bahwa beban ketergantungan berada pada kondisi yang dapat dianggap optimal, mengingat bahwa rasio ketergantungan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian dan struktur sosial. Dalam konteks ini, proporsi penduduk usia produktif yang signifikan terhadap penduduk nonproduktif menunjukkan fase yang sering

diidentifikasi sebagai “bonus demografi”, yang jika dikelola dengan baik, dapat membawa manfaat ekonomi substansial.

Namun, untuk meraih potensi penuh dari bonus demografi, perlu adanya strategi yang efektif dalam pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keahlian penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang besar ini dapat bersaing di pasar global. Selain itu, kebijakan yang mendukung inovasi dan entrepreneurship dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penting juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, yang memungkinkan investasi asing dan lokal berkembang, serta mempromosikan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu.

Menimbang transisi demografi yang akan datang, perencanaan juga harus mencakup penguatan sistem pensiun dan jaminan sosial untuk menanggung peningkatan proporsi lansia di masa depan. Hal ini akan memastikan bahwa saat penduduk usia kerja saat ini mencapai usia pensiun, akan ada dukungan yang memadai, menghindari peningkatan beban bagi generasi mendatang dan mempertahankan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.

# BAB II

# KEMISKINAN



<https://sulsel.bps.go.id>



## BAB II KEMISKINAN

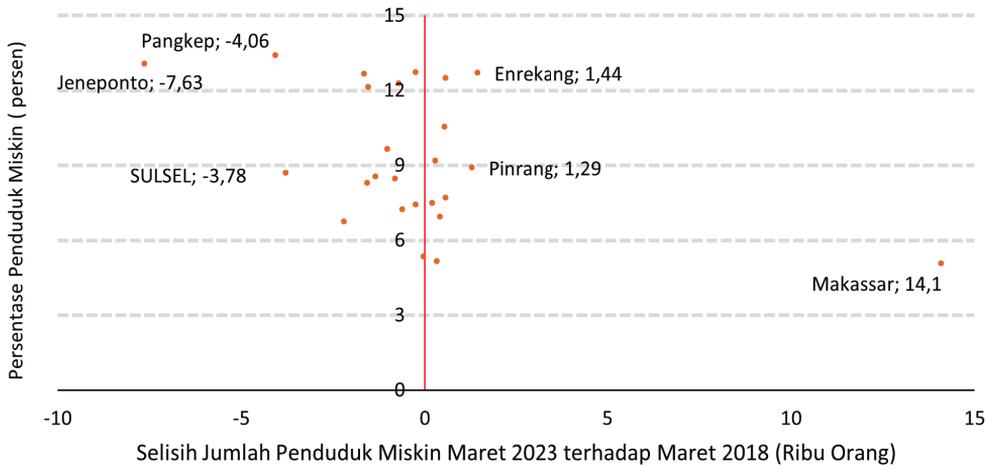
### Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Kemiskinan didefinisikan ketika seseorang tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup layak dan bermartabat. Tidak mudah untuk menentukan dan mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri memiliki banyak aspek. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun merupakan indikator nomor 1 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's Goal 1). Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah berharap dapat memberantas kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024. Hal ini dimuat pada instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem. Menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem terjadi ketika kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem (USD 1,9). Kemiskinan ekstrem ini diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Berdasarkan definisi tersebut, angka kemiskinan ekstrem Indonesia pada tahun 2021 sebesar 4% atau 10,86 juta jiwa. Angka kemiskinan ekstrem tersebut tergolong rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional (10,14 persen atau 27,54 juta jiwa) berdasarkan data Susenas Maret 2021.

Tercatat pada tahun 2023 ada sebanyak 25,90 juta penduduk miskin di Indonesia atau sekitar 9,36 persen dari total penduduk yang ada. Selama 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 2,27 juta orang dari yang semula sebanyak 28,17 juta orang di tahun 2013. Apabila dirinci berdasarkan wilayah, dari 100 penduduk miskin di Indonesia 56 penduduk miskin diantaranya hidup di pedesaan sedangkan 44 penduduk miskin lainnya hidup di kota. Komposisi penduduk miskin di desa yang lebih banyak daripada di kota, secara umum terjadi di hampir semua pulau (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) kecuali di Pulau Jawa yang mengalami hal sebaliknya.

Garis kemiskinan Sulawesi Selatan pada Maret 2023 sebesar Rp. 436.025. Nominal tersebut merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan 1 orang penduduk di Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Apabila terdapat penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah nominal tersebut, maka akan masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Tahun 2023, terdapat sekitar 778,85 ribu penduduk Sulawesi Selatan yang hidup dibawah garis kemiskinan. 577,37 ribu orang diantaranya hidup di wilayah pedesaan sedangkan sisanya berada di wilayah kota. Penurunan jumlah penduduk miskin di tahun 2023 menunjukkan keadaan yang mulai membaik dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun masih belum lebih baik dibandingkan kondisi maret 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

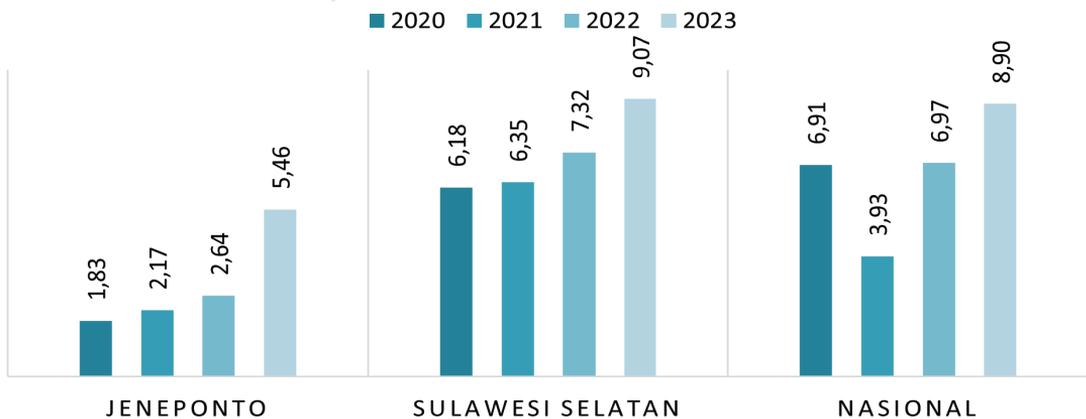
Gambar 2.1 menunjukkan perubahan kondisi kemiskinan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2018. Dapat terlihat pada garis vertikal berwarna merah bahwa persentase penduduk miskin 24 kabupaten kota di Sulsel berada pada rentang 3-15 persen. Dari sisi perubahan jumlah penduduk miskin, beberapa daerah sudah dapat menurunkan jumlah penduduk miskinnya dibandingkan kondisi di tahun 2018. Dua diantaranya adalah kabupaten



**Gambar 2.1** Kondisi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023

Sumber : BRS Kemiskinan, BPS Prov. Sulsel

Jeneponto dan Pangkep. Penduduk miskin di kabupaten tersebut telah berkurang masing-masing sebesar 7,63 dan 4,06 ribu orang. Walaupun secara persentase kedua kabupaten tersebut masih menjadi yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Kondisi lain yang dapat terlihat adalah masih ada 10 daerah yang justru mengalami peningkatan kemiskinan yang terwakilkan oleh titik oranye yang berada di sisi sebelah kanan garis merah. Dua diantaranya adalah Kabupaten Enrekang dan Pinrang yang masing-masing meningkat sebesar 1,44 dan 1,29 ribu orang. Adapun peningkatan penduduk miskin paling tinggi ada di Kota Makassar yang bertambah sebanyak 14,1 ribu orang selama 5 tahun terakhir.

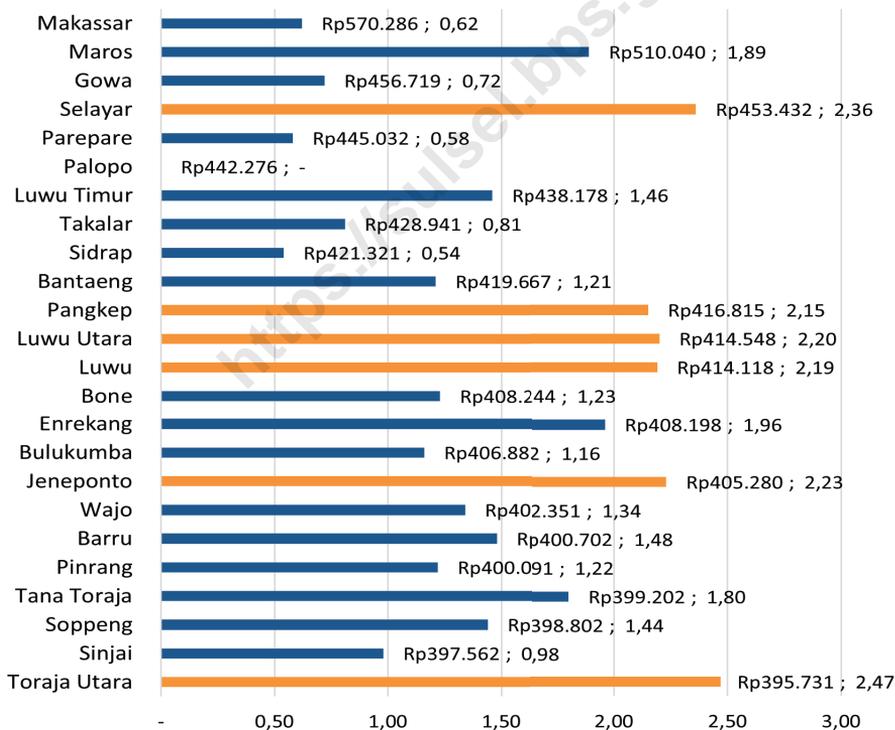


**Gambar 2.2** Pertumbuhan garis kemiskinan Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2023 (persen)

Sumber : BPS Prov. Sulsel

Besar nominal garis kemiskinan yang menjadi dasar penentuan status miskin tidaknya suatu penduduk akan berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya, menyesuaikan bagaimana harga kebutuhan di wilayah tersebut. Selain itu, pengaruh inflasi juga turut berkontribusi pada peningkatan garis kemiskinan setiap tahunnya. Inflasi gabungan 5 kota di Sulsel sebesar 2,81 persen pada tahun 2023. Hal ini berarti harga kebutuhan pokok yang perlu dikeluarkan masyarakat untuk biaya hidupnya meningkat sebesar 2,81 persen lebih tinggi dibandingkan harga tahun lalu. Bersamaan dengan hal itu, garis kemiskinan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 9,07 persen dibandingkan tahun lalu. Sejak tahun 2020, garis kemiskinan di Sulawesi Selatan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,23 persen per tahunnya. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata peningkatan garis kemiskinan nasional yang mencapai 6,68 persen. Adapun Kabupaten Jeneponto berhasil menekan peningkatan garis kemiskinan sehingga rata-rata kenaikannya hanya 3,02 persen per tahun, paling rendah dibandingkan 23 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.

### Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

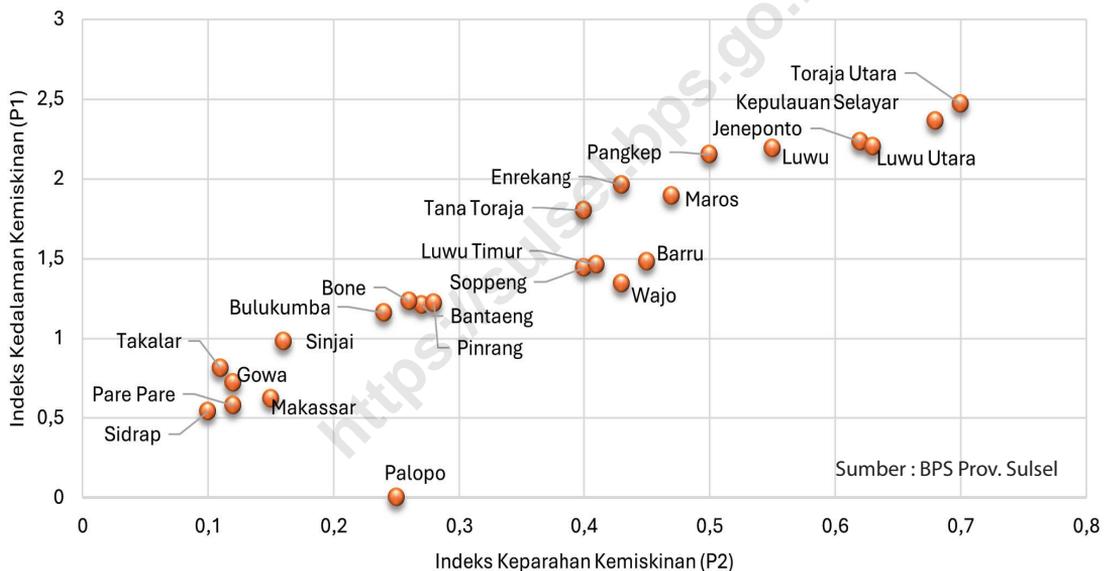


**Gambar 2.3** Garis Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2023

Sumber : BRS Kemiskinan, BPS Prov. Sulsel

Kondisi penduduk yang termasuk dalam kategori miskin dapat diketahui dengan menggunakan indikator Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2). Dengan 2 indikator tersebut dapat dilihat seberapa jauh pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang didekati melalui besar pengeluaran mereka dan seberapa

besar ketimpangan yang terjadi antara sesama penduduk miskin. Gambar 2.3 menyajikan indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2023 yang telah diurutkan sesuai garis kemiskinan yang tertinggi. Kondisi yang terjadi Sulawesi Selatan cukup beragam. Beberapa kabupaten dengan garis kemiskinan yang tinggi seperti Kota Makassar dan Gowa memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Maros yang mencapai 1,89. Hal ini mencerminkan bahwa besaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Maros memiliki jarak yang lebih jauh dari garis kemiskinan. Selain itu juga terdapat 7 kabupaten dengan indeks kedalaman kemiskinan lebih dari 1,89 ditandai dengan grafik berwarna oranye pada Gambar 2.3, diantaranya Kabupaten Selayar, Pangkep, Luwu Utara, Luwu, Jeneponto, dan Toraja Utara. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa penduduk miskin di daerah tersebut perlu peningkatan pendapatan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuh pokoknya dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih rendah.



**Gambar 2.4** Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2023

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 meningkat menjadi 0,41 persen, yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan antar penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota berada pada kisaran 0,12 hingga 0,70. Lebih rendah daripada kondisi keparahan kemiskinan secara nasional yang mencapai 1,53. Gambar 2.4 menunjukkan sebaran kabupaten/kota menurut kondisi keparahan sekaligus kedalaman kemiskinannya. Semakin tinggi dan semakin kanan titik suatu kabupaten/kota pada gambar, maka kondisi keparahan dan kedalaman kemiskinannya juga semakin tinggi. Posisi paling tinggi terjadi di Toraja Utara dan yang paling rendah terjadi di Sidrap. Hal ini mencerminkan bila kondisi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sidrap tidak jauh berbeda antar penduduk dan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok

sesuai batas garis kemiskinan tidak terlalu besar dibandingkan dengan kondisi penduduk miskin di Toraja Utara. Hubungan yang linier dari 2 indeks tersebut menunjukkan jika secara umum di Sulawesi Selatan, semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cenderung diikuti juga dengan ketimpangan yang tinggi antar penduduk miskinnya.

<https://sulsel.bps.go.id>



# BAB III

# KETENAGAKERJAAN



<https://sulsel.bps.go.id>



## BAB III KETENAGAKERJAAN

### 3.1 Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan

Angkatan kerja merupakan istilah yang merujuk pada sekelompok penduduk dalam usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun sebagai pencari kerja. Sesuai dengan The Labor Force Concept dari International Labour Organization (ILO) yang diadopsi oleh BPS, angkatan kerja mencakup mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Dalam hal ini, termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

**Tabel 3.1** Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan, 2021–2023

Kegiatan	Feb-21	Feb-22	Feb-23	Agt-21	Agt-22	Agt-23
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>4.433.714</b>	<b>4.592.327</b>	<b>4.555.438</b>	<b>4.412.782</b>	<b>4.559.375</b>	<b>4.694.483</b>
Bekerja	4.176.800	4.328.117	4.315.849	4.160.433	4.353.650	4.490.983
(%)	94,21	94,25	94,74	94,28	95,49	95,67
Pengangguran	256.914	264.210	239.589	252.349	205.725	203.500
(%)	5,79	5,75	5,26	5,72	4,51	4,33
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</b>	<b>65,36</b>	<b>65,85</b>	<b>64,37</b>	<b>64,73</b>	<b>66,18</b>	<b>65,66</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>5,79</b>	<b>5,75</b>	<b>5,26</b>	<b>5,72</b>	<b>4,51</b>	<b>4,33</b>

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Tabel 3.1 menyajikan gambaran angkatan kerja di Sulawesi Selatan dari Februari 2021 hingga Agustus 2023, menyoroti pertumbuhan dan dinamika angkatan kerja secara berkelanjutan. Pada Februari 2023, angkatan kerja tercatat sebesar 4.555.438 orang, dengan persentase pekerja dari angkatan kerja mencapai 94,74%, dan tingkat pengangguran sebesar 5,26%. Angka ini menunjukkan penurunan dari tingkat pengangguran sebelumnya yaitu 5,79% pada Februari 2021, merefleksikan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja.

Dalam periode yang sama dari Februari 2022 ke Februari 2023, terlihat sedikit penurunan dalam TPAK dari 65,85% menjadi 64,37%. Penurunan ini dapat mengindikasikan faktor-faktor musiman atau adaptasi terhadap dinamika ekonomi yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya, dari Agustus 2022 ke Agustus 2023, tercatat peningkatan dalam jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,18% dan penurunan yang signifikan dalam tingkat pengangguran sebesar 1,08%.

Peningkatan angkatan kerja dari Februari ke Agustus, ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang mungkin dipicu oleh

aktivitas ekonomi yang lebih dinamis di berbagai sektor dan implementasi kebijakan yang mendukung pembukaan lapangan kerja. Dinamika ini menandakan kemampuan ekonomi Sulawesi Selatan untuk menyerap angkatan kerjanya meskipun ada fluktuasi musiman.



**Gambar 3.1** Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin, Februari 2022 – Agustus 2023

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Analisis trend tahunan menunjukkan penurunan tingkat pengangguran dan penambahan angkatan kerja yang menandakan peningkatan kualitas kesempatan kerja atau efisiensi dalam penempatan tenaga kerja. Namun, ada ketidakseimbangan yang mencolok antara TPAK laki-laki dan perempuan, menunjukkan adanya hambatan yang mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan. Memahami dan mengatasi hambatan tersebut dapat membantu mengoptimalkan potensi tenaga kerja perempuan, yang akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

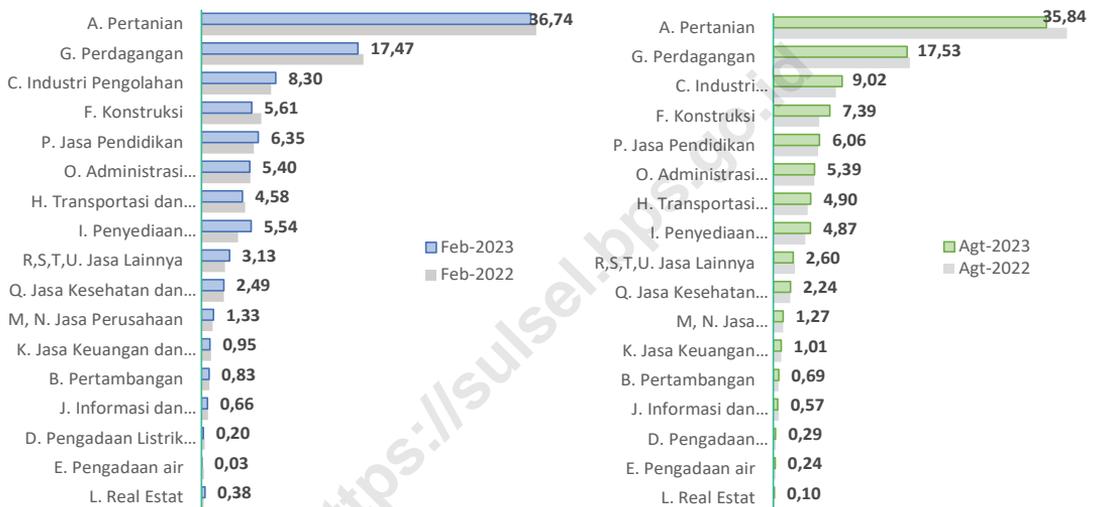
Dari perspektif demografi, peningkatan angkatan kerja yang stabil berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi regional. Namun, perlu juga diperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan pekerja dan penciptaan lapangan kerja untuk menghindari peningkatan pengangguran. Upaya untuk mendukung kesetaraan gender dalam tenaga kerja tidak hanya akan memperkuat ekonomi tetapi juga akan mendukung pencapaian kesetaraan sosial yang lebih luas di Sulawesi Selatan.

### 3.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Gambar 3.2 mengungkapkan perubahan komposisi tenaga kerja di Sulawesi Selatan menurut sektor pekerjaan dari Februari 2022 hingga Agustus 2023. Pada Februari 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turun dari 37,38% di Februari 2022 menjadi 36,74% di tahun berikutnya, meskipun masih menjadi kontributor terbesar terhadap tenaga kerja. Sementara itu, sektor Perdagangan dan Konstruksi, yang mengalami kenaikan dari Februari 2022 ke Februari 2023, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan diversifikasi dari ketergantungan pada pertanian.

Dinamika ini mencerminkan variabilitas musiman, dengan sektor seperti Konstruksi dan Industri Pengolahan mendapatkan momentum selama periode kering yang memungkinkan proyek-proyek berlangsung dengan lebih mudah. Pertumbuhan di sektor Konstruksi, dari 6,35% menjadi 7,39% dari Februari ke Agustus 2023, dan di Industri Pengolahan, dari 8,30% menjadi 9,02%, khususnya, mengindikasikan peningkatan investasi di sektor-sektor ini dan potensi peningkatan urbanisasi dan industrialisasi.

Sebaliknya, penurunan dalam sektor Pertanian bisa mengindikasikan adanya perpindahan tenaga kerja ke sektor lain, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan musim dan iklim, atau kebijakan pemerintah. Penurunan ini bisa juga menandakan modernisasi di sektor pertanian yang memungkinkan lebih sedikit tenaga kerja untuk menghasilkan output yang sama.



Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

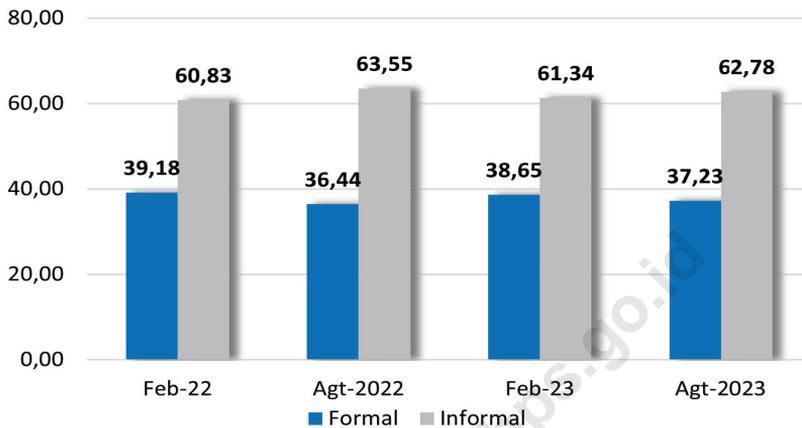
**Gambar 3.2** Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2023–Agustus 2023

### 3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Analisis terhadap distribusi tenaga kerja antara sektor formal dan informal selama periode Februari 2022 hingga Agustus 2023 mengungkapkan pola-pola penting yang berkaitan dengan dinamika ekonomi dan pekerjaan di Indonesia. Dari data yang disajikan pada gambar 3.3, terlihat bahwa persentase pekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan dengan sektor formal, namun ada kenaikan yang bertahap dalam sektor formal selama periode yang diobservasi. Pertimbangan musiman penting saat menganalisis perubahan antara bulan Februari dan Agustus, terutama karena faktor-faktor seperti musim panen atau pariwisata yang bisa mempengaruhi dinamika sektor formal dan informal.

Pada sektor formal, terdapat penurunan dari 39,18% pada Februari 2022 menjadi 38,65% pada Februari 2023. Sementara pada Agustus 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,79% dibandingkan persentase sektor formal pada Agustus 2022 yang sebesar 36,44%. Kenaikan

ini, meskipun tidak terlalu signifikan, mungkin mencerminkan perbaikan dalam ekonomi formal yang bisa disebabkan oleh investasi dalam infrastruktur, diversifikasi ekonomi, atau peningkatan dalam iklim bisnis yang mendukung perluasan perusahaan dan industri. Konsistensi dalam pertumbuhan sektor formal mengindikasikan bahwa terdapat penyerapan tenaga kerja yang lebih stabil dalam pekerjaan yang memberikan hak pekerja secara lebih lengkap dan kondisi kerja yang lebih teratur.



**Gambar 3.3** Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2022–Agustus 2023

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

**Tabel 3.2** Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Kegiatan Utama, Februari 2022 – Agustus 2023 (orang)

Kegiatan Utama	Februari 2022	Februari 2023	Agustus 2022	Agustus 2023
Berusaha sendiri	780.303	994.371	819.358	1.068.775
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	907.017	826.966	912.550	749.430
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	197.819	143.320	151.901	137.536
Buruh/karyawan/pegawai	1.497.843	1.443.452	1.516.274	1.534.390
Pekerja bebas di pertanian	103.818	103.020	79.762	94.237
Pekerja bebas di nonpertanian	124.936	103.553	102.495	160.815
Pekerja keluarga/tidak dibayar	716.381	738.968	733.509	745.800
<b>Jumlah</b>	<b>4.328.117</b>	<b>4.353.650</b>	<b>4.315.849</b>	<b>4.490.983</b>

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Dari segi demografi, peningkatan dalam angka pekerja formal bisa jadi dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang memiliki pendidikan formal dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern. Sementara itu, tingginya persentase tenaga kerja informal bisa mencerminkan kesenjangan dalam keterampilan atau mungkin

preferensi pekerjaan yang fleksibel atau berbasis di rumah yang memungkinkan individu untuk menjalankan usaha sendiri atau pekerjaan sampingan.

Pada Februari 2023, kategori buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase tertinggi sebesar 35.13%, menunjukkan peningkatan 0.53 persen poin dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat menunjukkan stabilitas atau pertumbuhan dalam sektor pekerjaan formal. Kategori berusaha sendiri mencatatkan kenaikan yang signifikan dari Februari 2022 ke Februari 2023 sebesar 0.96 persen poin yang menandakan adanya peningkatan ke arah ekonomi yang lebih berbasis pada kewirausahaan.

Dalam periode Agustus 2023, ada pertumbuhan pada kategori buruh/karyawan/pegawai sebesar 1.01 persen poin dari Agustus 2022. Kategori berusaha sendiri juga menunjukkan kenaikan sebesar 0.96 persen poin, sementara pekerja bebas di nonpertanian meningkat sebesar 1.20 persen poin. Kenaikan ini menandakan adanya diversifikasi peluang kerja di sektor-sektor selain pertanian. Di sisi lain, kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami penurunan sebesar 2.31 persen poin dari Agustus 2022 ke Agustus 2023, yang dapat menunjukkan peralihan tenaga kerja ke sektor lain atau perubahan dalam ekonomi lokal.

Dinamika antara Februari dan Agustus dipengaruhi juga oleh faktor musiman, seperti aktivitas pertanian atau musim pariwisata. Selain faktor musiman, perubahan ini juga bisa mencerminkan efek dari kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih luas, seperti inisiatif pengembangan sumber daya manusia, program pelatihan kerja, dan perubahan dalam permintaan pasar akibat pengaruh global dan teknologi.

### 3.4 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

**Tabel 3.3** Penduduk Bekerja di Sulawesi Selatan Menurut Kegiatan Utama, Februari 2022 – Agustus 2023 (orang)

Kegiatan Utama	Februari 2022	Februari 2023	Agustus 2022	Agustus 2023
SD ke Bawah	1.709.306	1.733.118	1.723.259	1.710.459
Sekolah Menengah Pertama	637.698	644.307	654.224	673.779
Sekolah Menengah Atas	891.015	979.274	987.663	1.011.284
Sekolah Menengah Kejuruan	338.753	305.533	294.515	356.334
Diploma I/II/III	103.920	103.067	103.284	96.762
Diploma IV, S1, S2, S3	647.425	588.351	552.904	642.365
<b>Jumlah</b>	<b>4.328.117</b>	<b>4.353.650</b>	<b>4.315.849</b>	<b>4.490.983</b>

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Tabel 3.3 menunjukkan penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari Februari 2022 hingga Agustus 2023. Pada Agustus 2023, terdapat peningkatan jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan SMP, SMA, SMK, dan Diploma IV/S1/S2/S3 dibandingkan dengan Agustus 2022, dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,20 persen poin, 0,02 persen poin, 0,92 persen poin, dan 0,79 persen poin. Perubahan

ini menandakan adanya tren peningkatan dalam angkatan kerja yang memiliki pendidikan menengah hingga tinggi.

Sebaliknya, penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah dan Diploma I/II/III menunjukkan penurunan persentase. Pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 1,72 persen poin dan pendidikan Diploma I/II/III turun sebesar 0,21 persen poin. Penurunan ini dapat menunjukkan pergeseran kebutuhan dalam pasar tenaga kerja, di mana pendidikan yang lebih tinggi mungkin menjadi lebih diutamakan atau ada peningkatan dalam kesempatan pendidikan yang lebih tinggi yang dimanfaatkan oleh penduduk.

Angka ini mencerminkan dinamika pasar kerja yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, termasuk kebijakan pendidikan, struktur ekonomi, dan inisiatif pengembangan sumberdaya manusia. Peningkatan dalam tenaga kerja berpendidikan tinggi dapat menunjukkan potensi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan di tingkat pendidikan lebih rendah mungkin menuntut perhatian terhadap pelatihan dan pengembangan kejuruan untuk memastikan pemerataan kesempatan kerja.

### 3.5 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

**Tabel 3.4** Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Februari 2022–Agustus 2023

Kegiatan Utama	Februari 2022	Februari 2023	Agustus 2022	Agustus 2023
Pekerja Penuh ( $\geq$ 35 jam)	62,67	63,99	59,89	62,33
Pekerja Tidak Penuh (1–34 jam)	37,33	36,01	40,11	37,67
Setengah Pengangguran	6,84	6,23	7,13	7,09
Pekerja Paruh Waktu	30,49	29,78	32,98	30,58

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (minimal 35 jam per minggu), dengan persentase sebesar 62,33 persen pada Agustus 2023, sedangkan sisanya merupakan pekerja tidak penuh (bekerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2022, pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 1,66 persen poin.

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2023 adalah sebesar 7,09 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar tujuh orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen poin.

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu di Sulawesi Selatan pada Agustus 2023 sebesar 37,67 persen, artinya dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 37 hingga 38 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2022, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 1,66 persen poin.

### 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dapat dilihat dari nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penganggur terbuka mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada Agustus 2023 adalah 4,33 persen, mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT

**Tabel 3.5** Karakteristik Pengangguran (Persen), Februari 2022–Agustus 2023

Kegiatan	Februari 2022	Agustus 2022	Februari 2023	Agustus 2023
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>5,75</b>	<b>4,51</b>	<b>5,26</b>	<b>4,33</b>
TPT Menurut Jenis Kelamin				
Laki-laki	5,58	4,91	5,25	4,39
Perempuan	6,03	3,90	5,37	4,25
<b>TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal</b>				
Perkotaan	9,72	7,84	9,04	6,24
Perdesaan	2,80	1,91	2,37	2,80
<b>TPT Menurut Tingkat Pendidikan</b>				
SD ke Bawah	3,01	2,34	1,42	1,89
Sekolah Menengah Pertama	6,75	4,05	3,09	2,52
Sekolah Menengah Atas	8,53	8,19	7,89	7,44
Sekolah Menengah Kejuruan	8,61	6,04	13,03	6,99
Diploma I/II/III	7,53	3,15	6,49	5,19
Diploma IV, S1, S2, S3	6,03	4,33	9,49	5,82

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, BPS Prov. Sulsel

mengalami penurunan sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin TPT laki-laki sebesar 4,39 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,25 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022, sedangkan TPT perempuan mengalami peningkatan 0,35 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,24 persen) lebih tinggi dua kali TPT di daerah perdesaan (2,80 persen). TPT di perkotaan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022 sebesar 1,60 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,89 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja pada Agustus 2023, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,44 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 1,89 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada kategori pendidikan SD ke bawah, SMP, dan SMA, dengan penurunan terbesar pada kategori pendidikan SMP yaitu sebesar 1,54 persen poin. Sebaliknya peningkatan TPT terjadi pada kategori pendidikan SMK, Diploma I/II/III, serta Diploma IV, S1, S2, S3, dengan peningkatan terbesar pada kategori pendidikan Diploma I/II/III sebesar 2,04 persen poin. terbesar pada kategori pendidikan Diploma I/II/III sebesar 2,04 persen poin.

<https://sulsel.bps.go.id>

# **BAB IV**

# **INDEKS**

# **PEMBANGUNAN**

# **MANUSIA**



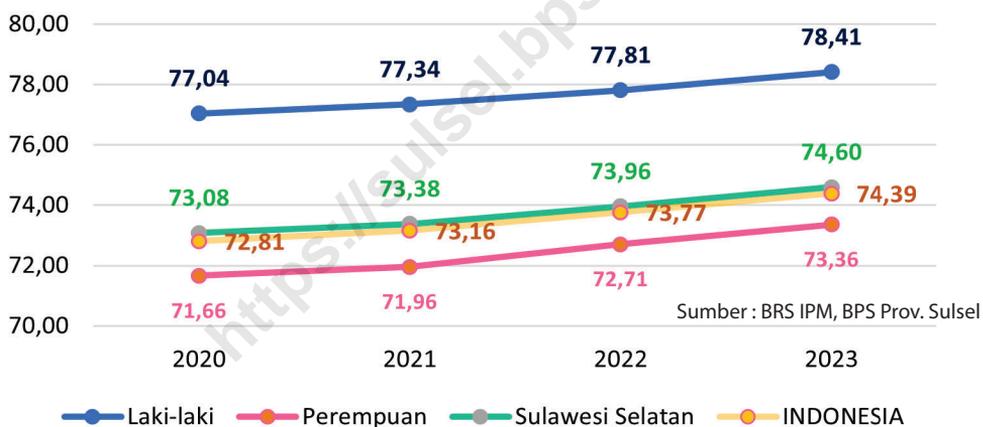
<https://sulsel.bpp.go.id>



## BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

### 4.1 Perkembangan IPM

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita. Mulai tahun 2023, BPS melakukan pemutakhiran sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020-LF) yang memberikan gambaran lebih akurat dan terkini.



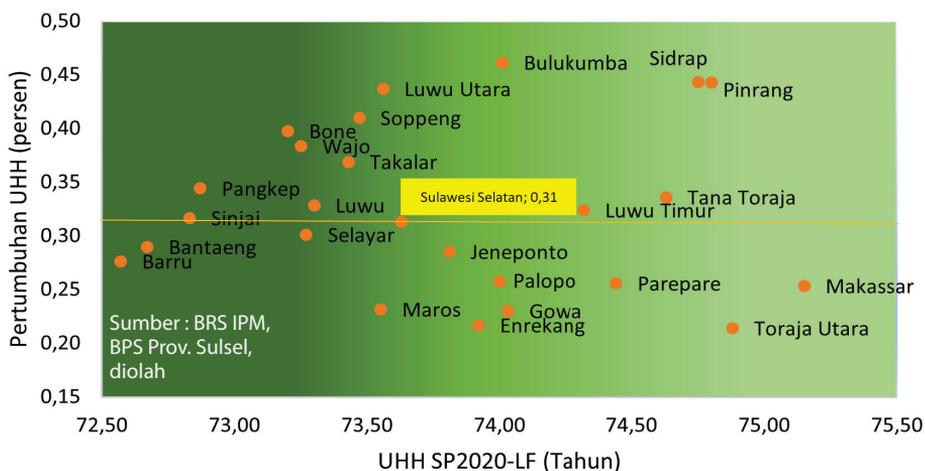
**Gambar 4.1** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan (SP2020-LF), 2020 – 2023

IPM Sulawesi Selatan telah menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, mencapai angka 74,60 pada tahun 2023, yang menandakan pertumbuhan sebesar 0,87 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa Sulawesi Selatan berada dalam kategori IPM tinggi. Dari tahun 2020 hingga 2023, tercatat peningkatan IPM Sulawesi Selatan sebesar 1,52 poin. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,69 persen ini mencerminkan peningkatan yang stabil. Tren peningkatan pertumbuhan ini sejalan dengan perbaikan yang terjadi secara keseluruhan dalam komponen-komponen yang membentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan gender, IPM Laki-laki memiliki capaian yang lebih tinggi daripada IPM Perempuan dengan selisih sebesar 5,05 poin. Perbedaan capaian keduanya mengindikasikan belum meratanya pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, rata-rata pertumbuhan tahunan IPM perempuan saat ini sebesar 0,78 persen, lebih tinggi daripada laki-laki yang sebesar 0,59 persen per tahun. Kecepatan peningkatan IPM perempuan ini diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari

capaian IPM laki-laki pada masa mendatang.

Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 didorong oleh peningkatan di semua indeks komponen pembentuknya. Indeks kesehatan memiliki capaian sebesar 82,51, yang diwakili oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH) menunjukkan peningkatan sebesar 0,631 persen atau meningkat 0,23 poin dari tahun sebelumnya, yang dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari peningkatan akses ke layanan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam buku statistik kesejahteraan yang memuat data hasil Susenas Maret 2023 menunjukkan beberapa hal berikut :

1. Jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan penduduk sulsel saat ini adalah BPJS yang mencapai 79,58 persen, 2,35 persen penduduk lainnya memilih menggunakan jamkesda, asuransi swasta, atau jaminan kesehatan dari perusahaan. Namun masih terdapat 18,23 persen penduduk yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
2. 41 dari 1000 balita di Sulsel belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, lebih khusus lagi untuk balita laki-laki yang mana persentase pemenuhan imunisasinya lebih rendah dari perempuan.
3. Rata-rata baduta di Sulsel menerima ASI selama 10-11 bulan. Lama pemberian ASI paling tinggi ada di Luwu Utara (12,15 bulan), sedangkan yang terendah ada di Soppeng (7,62 bulan).
4. Sebanyak 32 dari 100 perempuan berusia 10 tahun ke atas telah memutuskan untuk menikah pada usia 10-18 tahun. Serta 23 dari 100 perempuan usia 15-49 tahun juga pernah hamil pertama kali pada usia 15-18 tahun.
5. Penolong persalinan selama 2 tahun terakhir paling banyak dilakukan oleh Bidan (55,54 persen), diikuti oleh dokter kandungan (40,71 persen), dokter umum (1,51 persen), dan perawat (1,056 persen). Persentase penolong kesehatan yang tinggi diharapkan dapat mengurangi resiko angka kematian bayi serta kematian ibu hamil.



**Gambar 4.2** Sebaran Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2023

Gambar 4.2 mengilustrasikan sebaran UHH kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berdasarkan capaian angka UHH dan laju pertumbuhannya pada tahun 2023. Sumbu horizontal menunjukkan umur harapan hidup, dimana semakin ke kanan posisi kabupaten/kota, semakin tinggi pula capaian angka UHH-nya pada tahun 2023. Adapun sumbu vertikal menggambarkan laju pertumbuhan UHH, dimana posisi yang lebih tinggi menandakan laju pertumbuhan yang lebih cepat.

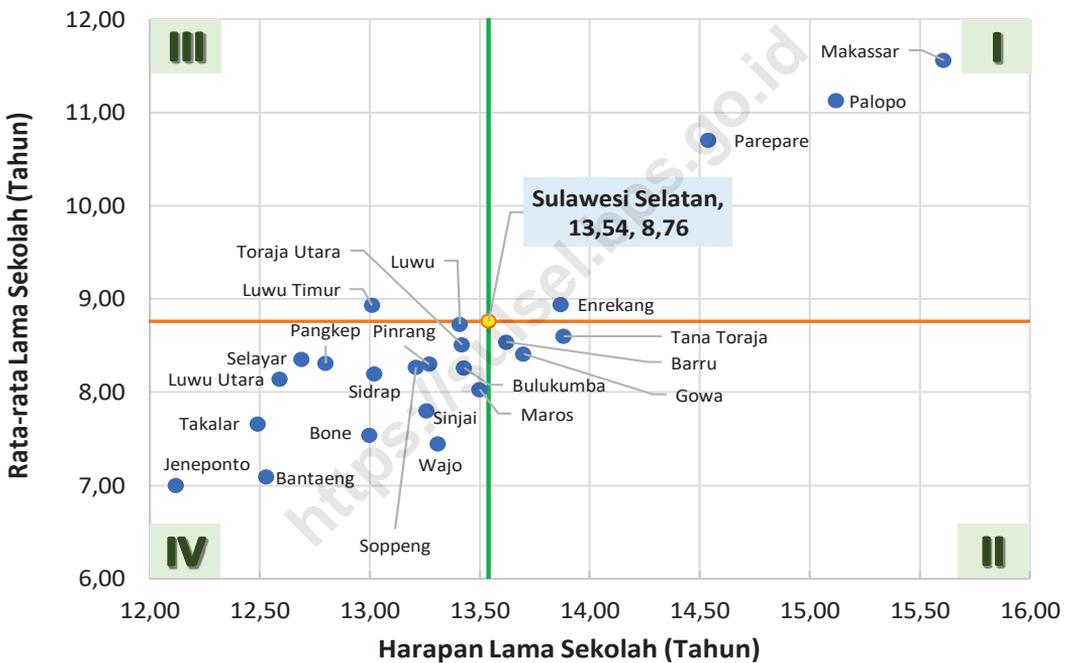
Kota Makassar, Toraja Utara, dan Pinrang menonjol sebagai 3 daerah di Sulawesi Selatan dengan capaian tertinggi, masing-masing mencapai angka 75,15, 74,88 dan 74,80. Dari ketiga daerah tersebut Pinrang mengalami peningkatan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan 2 lainnya. Kabupaten/kota yang terletak di area tengah menunjukkan bahwa beberapa di antaranya seperti Enrekang dan Gowa menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif rendah dibandingkan Sulawesi Selatan secara umum, yang mengindikasikan bahwa meski capaian mereka lebih tinggi dari UHH sulsel, masih ada peluang untuk percepatan pertumbuhan di masa mendatang. Di sisi paling kiri bawah terdapat Kabupaten Barru dan Bantaeng yang memiliki UHH paling rendah serta pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan 22 daerah lainnya, menunjukkan masih ada ruang yang signifikan untuk peningkatan dan percepatan umur harapan hidup yang lebih tinggi.

Dimensi pengetahuan, yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,07 persen dan 1,51 persen sehingga menghasilkan capaian indeks pendidikan sebesar 66,81. Berikut ini beberapa informasi yang berkaitan dengan kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan yang bersumber dari hasil Susenas Maret 2023:

1. Kemampuan membaca huruf latin pada penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas mencapai 94,64 persen. sedangkan pada perempuan dengan usia yang sama tercatat lebih rendah, yakni sebesar 91,63 persen
2. Kemampuan membaca huruf latin pada penduduk usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi (15-24 tahun) sebesar 99,85 persen.
3. Dari 100 penduduk usia 7-23 tahun, 1 orang belum bersekolah, 75-76 orang diantaranya masih sekolah, dan 23 orang sudah tidak bersekolah lagi terutama untuk penduduk laki-laki yang mencatatkan persentase yang lebih tinggi dari perempuan.
4. Angka partisipasi sekolah pada usia pendidikan dasar 9 tahun (7-15 tahun) sudah mencapai lebih dari 90 persen, namun saat memasuki usia yang lebih tinggi partisipasinya menurun drastis menjadi 71 persen pada usia 16-18 tahun dan hanya 37,89 persen di usia 19-23 tahun.
5. Penduduk usia SMA yang masih bersekolah di Tingkat SMA sebesar 60,57 persen, sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi hanya sebesar 30,41 persen.

Capaian indeks pendidikan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan tahun 2023, yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), menunjukkan variasi yang substantial antar wilayah. Gambar 4.3 membagi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan ke dalam empat kelompok berdasarkan kedua indikator tersebut. Kelompok I berisi

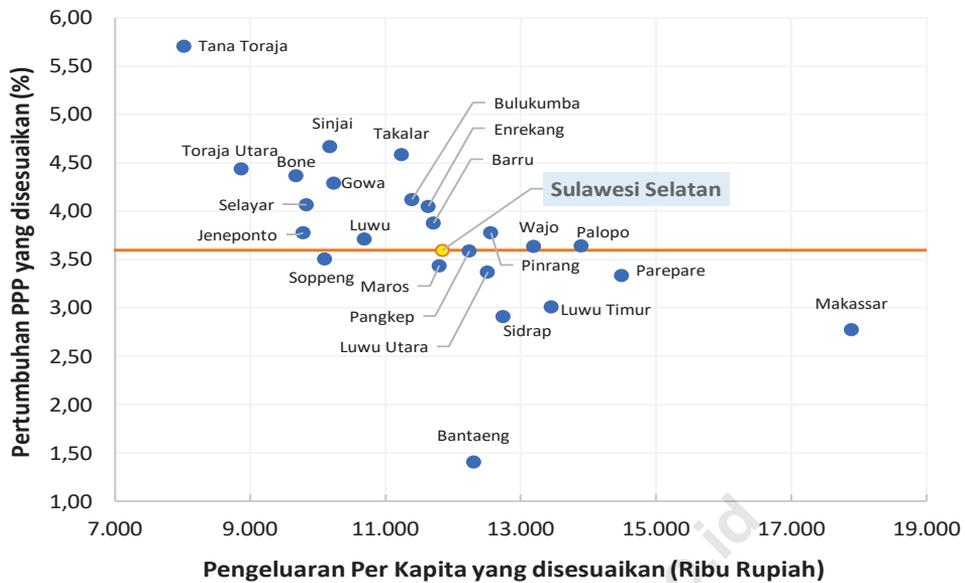
daerah yang mencatatkan HLS dan RLS yang melebihi rata-rata provinsi. Di Kelompok II daerah yang memiliki HLS yang lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Selatan, tetapi RLS mereka berada di bawah rata-rata. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penduduk di wilayah ini memiliki akses ke pendidikan dasar, namun masih kesulitan mempertahankan siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kabupaten Luwu Timur yang berada di Kelompok III, memiliki RLS yang lebih tinggi namun HLS yang masih rendah, menandakan pendidikan wajib berhasil menjangkau sebagian besar penduduk namun transisi ke pendidikan yang lebih tinggi masih terbatas. Kelompok IV mencakup 16 kabupaten dengan HLS dan RLS di bawah rata-rata Sulawesi Selatan sehingga perlu didorong dengan kebijakan yang akan berdampak pada pengurangan angka putus sekolah dan mendorong minat penduduk untuk dapat kembali bersekolah.



**Gambar 4.3** Sebaran Kabupaten/Kota menurut Indikator pada Indeks Pendidikan (HLS dan RLS), 2023

Sumber : BRS IPM-BPS Prov. Sulsel, diolah

Komponen indeks standar hidup layak tercatat sebesar 75,30 dari skala 100. Komponen ini menunjukkan peningkatan paling tinggi dibandingkan indikator lainnya yang tercermin melalui indikator pengeluaran per kapita (PPP) yang disesuaikan. Lebih detailnya, pengeluaran penduduk saat ini telah meningkat sebesar 3,60 persen atau bertambah Rp 411.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Wilayah perkotaan seperti Makassar, Parepare, dan Palopo, yang merupakan pusat ekonomi dan administratif, memiliki angka pengeluaran per kapita yang paling tinggi. Di sisi lain terdapat kabupaten Tana Toraja yang memiliki pengeluaran paling rendah dibandingkan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan namun menunjukkan pertumbuhan paling tinggi. Sementara itu terdapat Kabupaten Bantaeng yang memiliki pengeluaran sedikit lebih tinggi dari rata-rata sulawesi selatan namun pertumbuhannya kurang dari 1,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



**Gambar 4.4** Sebaran Kabupaten/Kota menurut Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan dan Pertumbuhannya, 2023

Sumber : BRS IPM-BPS Prov. Sulsel, diolah



# DAFTAR PUSTAKA



<https://sulsel.bps.go.id>



# Daftar Pustaka

- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2023. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Agustus 2022. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan Agustus 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Profil Kemiskinan di Sulawesi Selatan Maret 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Sulawesi Selatan, Maret 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan Tahun 2023. Berita Resmi Statistik, Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2023. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2023. Makassar: BPS Provinsi Sulawesi Selatan.





**ST2023**

**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125  
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125  
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>  
E-mail: [bps7300@bps.go.id](mailto:bps7300@bps.go.id)

